



Jatim Dapat Predikat Opini WTP 9 Kali

Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan ✓ Pemprov Jatim 2023

DPRD Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Tahun 2023 kemarin (2/5). Rapat yang diadakan di ruang paripurna kantor dewan itu dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi SH MHum dan diikuti oleh 70 anggota dewan, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Sekda Jatim, serta anggota BPK RI.

Kusnadi mengatakan, rapat tersebut merupakan hasil akhir pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. "Hal itu demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Anggota V BPK RI Dr Ir Ahmad Noor Supit MM CSFA CGRE CertDA mengatakan, Maret lalu, pihaknya telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jatim. Pemeriksaan tidak hanya bertujuan mengajukan opini dari BPK, tetapi juga mengindikasikan kelemahan. BPK memberikan saran, arahan, dan masukan yang konstruktif untuk kemajuan tata

kelola keuangan pemerintah.

"Hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini LPH LKPD Provinsi Jatim Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Penekanan Satu Hal," ujar Ahmad Noor yang disambut tepuk tangan seluruh undangan.

Dalam sambutannya, Ahmad Noor juga berpesan tentang pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien.

Sebab, setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD bukan hanya angka dalam laporan. Namun, merupakan harapan masyarakat untuk kemajuan daerah dan peningkatan taraf hidup.

"Pemprov harus terus membangun pengelolaan keuangan yang bersih, efisien, dan transparan. Setiap dana yang dikelola

harus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," tutur Ahmad Noor.

Atas status Opini WTP yang diterima Pemprov Jatim, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono memberikan apresiasi bagi semua pihak. Baginya, Opini WTP itu merupakan salah satu indikator bahwa Jatim mampu mengelola keuangan dengan baik.

"Kita patut bersyukur, pengelolaan keuangan di Jatim sudah mendapat predikat Opini WTP sebanyak 9 kali berturut-turut sejak 2015. Ini menandakan Pemprov Jatim telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik-baiknya. Dan, apabila ada kesalahan, maka itu masih dalam batas kewajaran," ungkapnya.

Adhy Karyono juga menyambut baik

masukan yang diberikan oleh Ahmad Noor. Baginya, pemeriksaan keuangan bukan akhir, namun sarana menuju upaya kestabilan keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, pihaknya bakal terus meningkatkan pengelolaan keuangan di pemerintahan. (ree/c17/xav)



Kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Jatim yang telah sukses menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Semoga predikat dan hasil yang baik ini bisa menjadi pelecut semangat meningkatkan pengelolaan keuangan Jatim."

KUSNADI SH MHUM
Ketua DPRD Provinsi Jatim



SUGENG DEAS/JAWA POS

CAPAIAN POSITIF: DPRD Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Tahun 2023 kemarin (2/5).